

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Andriani, dkk. (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa usaha kecil menengah Peggy Salon telah menerapkan akuntansi secara sederhana dan dilakukan dengan cara manual belum sesuai dengan pencatatan akuntansi berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam usaha kecil menengah tersebut, sedangkan faktor eksternal yaitu disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM (*stakeholder*) yakni dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator.

Alfitri, dkk (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa perajin mebel di desa Gondangsari kecamatan Juwiring kabupaten Klaten kurang memiliki kemampuan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh perajin mebel tidak sesuai dengan siklus akuntansi dan tidak menerapkan SAK ETAP, Kendala-kendala perajin mebel dalam menerapkan SAK ETAP yaitu karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan perajin mebel dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK

ETAP serta belum adanya tenaga akuntansi yang profesional pada perajin mebel di desa Gondangsari kecamatan Juwiring kabupaten Klaten.

Notohatmodjo (2014) memperoleh kesimpulan bahwa pemahaman pencatatan akuntansi bagi usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang masih rendah. Jadi, penggunaan laporan keuangan belum sesuai dengan pencatatan akuntansi berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang masih belum mengerti dan menganggap sistem pencatatan akuntansi merupakan hal yang sulit.

Pratiwi, dkk. (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa PT. Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pernyataan eksplisit dan secara penuh mengenai kepatuhan tentang penggunaan laporan keuangan lengkap pada catatan atas laporan keuangan dan tidak adanya pengungkapan seluruh kebijakan akuntansi signifikan yang seharusnya tercantum pada catatan atas laporan keuangan.

Yulinarti (2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Koperasi KUD Tri Karsa Jaya kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. KUD Tri Karsa Jaya belum membuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan

atas laporan keuangan. Pada bagian laporan keuangan neraca dan perhitungan usaha juga masih belum sesuai dengan SAK ETAP.

Ariantini (2014) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri belum menyusun laporan keuangan sepenuhnya berdasarkan SAK ETAP. Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan hasil usaha.

Penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk (2014), Alfitri, dkk (2014), Notohatmodjo (2014), Pratiwi, dkk. (2014), Yulinarti (2013), dan Ariantini (2014) diketahui bahwasanya suatu badan usaha yang berskala kecil dan menengah belum menyusun laporan keuangan lengkap berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian persekutuan komanditer dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan laporan keuangan di CV. Karya Duta. Sedangkan, penelitian sebelumnya objek penelitian yang di pilih adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM), koperasi, dan perseroan terbatas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Martani (2012;15-17) standar pada dasarnya berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Standar akuntansi berisikan pedoman-pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat pilar yaitu:

1. Standar akuntansi keuangan (SAK)

Standar akuntansi keuangan digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti: asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

2. Standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)

Berbeda dengan SAK Umum SAK ETAP mengadopsi IFRS untuk standar akuntansi yang diperuntukkan untuk *Small Medium Enterprise* (SME) dengan beberapa penyederhanaan. (Martani, 2012;17)

3. Standar akuntansi syariah khusus untuk entitas dan transaksi syariah.

Standar akuntansi syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.

Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah)

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Menurut Kartikahadi (2012;17) SAK UMUM dan SAK ETAP diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Sedangkan standar akuntansi syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Kedua Dewan tersebut berada di bawah naungan IAI. Menurut Harahap (2012;174) Ikatan Akuntansi Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Sejak tahun 1991 ketika diadakan Seminar Nasional Prinsip Akuntansi Indonesia, IAI telah memikirkan apakah perlu dibuatkan dua perangkat standar akuntansi keuangan. Satu perangkat berlaku bagi perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM). Pada

waktu itu, kepusatannya adalah waktu dan tenaga yang serba terbatas untuk merampungkan satu perangkat standar akuntansi, yaitu mengubah PAI menjadi SAK. Tapi perkembangan terakhir dengan makin giatnya dilakukan konvergensi IFRS, menjadi makin sulit bagi UKM untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK yang berkembang makin kompleks dan komprehensif, padahal banyak SAK yang tidak relevan bagi entitas yang tidak mengemban akuntabilitas publik. Maka dalam kongres X IAI telah diputuskan untuk membentuk komite standar akuntansi keuangan ETAP dibawah koordinasi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 2009 telah berhasil disusun SAK entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang berlaku efektif 1 Januari 2011.

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berlaku umum merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyangkut kepentingan publik, khususnya bagi entitas berskala besar terutama yang menjual surat berharga (saham atau obligasi) dipasar modal (emiten), bank, asuransi, dana pensiun dan lain-lain.

Standar akuntansi keuangan menunjukkan tren perkembangan yang sangat pesat, makin komprehensif dan kompleks. Seiring dengan dinamika globalisasi, standar akuntansi keuangan juga makin peka terhadap perkembangan yang terjadi di akuntansi internasional. Padahal mayoritas entitas di Indonesia adalah berskala kecil dan menengah, yang lazimnya tidak banyak menyangkut kepentingan publik.

Selain pemilik yang lazimnya juga merangkap sebagai pengurus entitas, tentunya bank sebagai pemberi kredit berkepentingan atas laporan keuangan entitas

usaha kecil dan menengah sehingga dari sudut tujuan laporan keuangan dan pengguna informasi tentunya sangat berbeda dengan konsep sebagaimana digariskan pada kerangka dasar untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang sarat akuntabilitas publik. Pada bulan Mei 2009, DSAK-IAI telah menerbitkan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal, misalnya; pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha (pemegang saham PT tertutup yang tidak ikut mengurus, persero komanditer tidak aktif) kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. (Kartikahadi, dkk., 2012;18 dan 69)

Menurut Rudianto, (2012; 24) badan usaha yang tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik adalah:

- a. Entitas perorangan,
- b. Persekutuan perdata
- c. Firma
- d. *Commanditaire Vennootschap (CV)*;
- e. Perseroan Terbatas, yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
- f. Koperasi

Menurut Martani, dkk (2012;17) standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public atau biasa disebut dengan SAK ETAP mengadopsi IFRS untuk standar akuntansi yang diperuntukkan untuk *Small Medium Enterprise* (SME) dengan beberapa penyederhanaan. Standar ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam standar ETAP adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca.
- 2) Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.
- 3) Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana. Namun, beberapa pihak berpendapat penggunaan istilah ETAP memberikan kesan bahwa entitas tidak memiliki akuntabilitas. Padahal semua entitas

pasti memiliki akuntabilitas pada publik namun tingkat akuntabilitasnya yang berbeda.

Standar ini efektif dapat digunakan untuk laporan keuangan tahun 2009. Entitas yang memenuhi kriteria menggunakan ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap menggunakan PSAK maka pada tahun berikutnya harus konsisten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah menggunakan SAK ETAP.

Menurut SAK ETAP (2009), Penerapan SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggungjawab public signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK UMUM dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Bisnis dalam skala kecil maupun besar, laporan keuangan berperan sangat penting, bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan dan untuk memperoleh gambaran kondisi kinerja perusahaan. Jika, seorang pelaku usaha melakukan pencatatan laporan keuangan yang baik maka akan membantu seseorang pelaku usaha tersebut dalam mengetahui transaksi apa saja yang telah dilakukan usahanya selama periode tertentu. Dengan mengetahui transaksi apa yang telah dilakukan, pelaku usaha dapat

memperkirakan berapa uang yang telah dan akan dipakai untuk mengembangkan usahanya kedepan.

Teori kepatuhan yang digunakan dalam penelitian Notohatmodjo (2014) menjelaskan bahwa perspektif instrumental menggambarkan pembuatan sistem pencatatan akuntansi dilakukan sebagai respon akan semakin berkembangnya dunia usaha saat ini agar perusahaan dapat terus bertahan dan semakin maju. Dalam perspektif normatif, pembuatan sistem pencatatan akuntansi akan membuat perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku karena menganggap peraturan itu merupakan suatu keharusan yang wajib ditaati.

Menurut SAK-ETAP (bab 2 paragraf 1) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan harus menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Sugiri S dan Riyono (2002;22) mengungkapkan bahwa karakteristik laporan keuangan terdiri dari:

1. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. Dalam konteks ini para pihak pengguna sendiri dituntut memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai akuntansi dan informasi keuangan yang dikandungnya.
2. Relevan, artinya informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang tidak berpautan dengan pemanfaatannya tidaklah relevan dan tidak ada gunanya. Berhubung laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang memiliki macam-macam tujuan, maka upaya penyajian informasi yang relevan lebih difokuskan kepada kepentingan umum pengguna.
3. Keandalan, artinya informasi memiliki kualitas yang andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat di perbandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.

Dengan menyusun laporan keuangan dan memahami isi dan laporan keuangan, diharapkan akan dapat membantu pengusaha dalam membuat keputusan dalam mengembangkan usaha, baik keputusan investasi maupun keputusan untuk mengajukan kredit usaha. Setelah laporan keuangan selesai disusun, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi kondisi dan potensi perusahaan yang dalam hal ini adalah Persekutuan Komanditer.

2.2.5 Komponen laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP

Menurut SAK-ETAP (bab 3 paragraf 12) laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca;
 2. Laporan laba rugi;
 3. Laporan perubahan ekuitas;
 - i) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - ii) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
 4. Laporan arus kas; dan
 5. Catatan atas laporan keuangan
- a. Neraca;
- Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Pada neraca minimal mencakup pos-pos berikut (SAK-ETAP bab 4 paragraf 2):

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) Persediaan;
- d) Properti investasi;
- e) Aset tetap;
- f) Aset tidak berwujud;
- g) Utang usaha dan utang lainnya;
- h) Aset dan kewajiban pajak;
- i) Kewajiban diestimasi;
- j) ekuitas.

b. Laporan laba rugi;

Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut (SAK-ETAP bab 5 paragraf 3):

- a) Pendapatan;
- b) Beban keuangan;
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d) Beban pajak;
- e) Laba atau rugi neto.

c. Laporan perubahan ekuitas

Suatu entitas dalam menyajikan laporan perubahan ekuitas yaitu menunjukkan (SAK-ETAP bab 6 paragraf 3);

- a) Laba atau rugi untuk periode;
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui
- d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - 1) Laba atau rugi;
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

d. Laporan arus kas;

Menurut SAK-ETAP (bab 7 paragraf 3-6) informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

a) **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

b) **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c) **Arus kas pendanaan**

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- 4) Pelunasan pinjaman;
- 5) Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut SAK-ETAP (bab 8 paragraf 2) dalam menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, struktur catatan atas laporan keuangan harus ;

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.2.6 Definisi Persekutuan Komanditer (CV)

Sugiri (2001; 12) menyatakan bahwa perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang menjalankan usahanya dengan nama bersama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan persekutuan biasanya memiliki perjanjian tertulis (*The articles of partnership*) yang mengikat para sekutu. Isinya yaitu :

1. Tujuan utama perusahaan
2. Tata cara pemenuhan pembelanjaan perusahaan
3. Tata cara pengelolaan perusahaan

4. Tata cara pembagian keuntungan dan beban kerugian
5. Tata cara pembubaran persekutuan.

Soemarso (2003;110) mengungkapkan bahwa persekutuan komanditer atau CV yaitu firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyediakan uang barang atau tenaga sebagai setoran modal.

Menurut Amirullah dan Hardjanto (2005;56) persekutuan komanditer merupakan perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng (solider) dan satu orang atau lebih sebagai pihak yang mempercayakan uangnya. (Lupiyoadi R. dan Wacik J, 1998). Bentuk persekutuan dapat digambarkan sebagai suatu persekutuan secara sukarela atas sumber-sumber yang dimiliki oleh dua orang atau lebih menjadi suatu usaha atau bisnis. Jumlah modal yang diinvestasikan tidak harus sama untuk setiap partner. Beberapa partner ada yang tidak menginvestasikan dalam bentuk uang. Sebagai gantinya mereka menyumbangkan jasa atau nama mereka. Jika tidak terdapat perjanjian khusus diantara partner, setiap partner akan memperoleh laba atau rugi yang sama, dengan mengabaikan jumlah modal yang ditanam.

Perjanjian untuk membentuk persekutuan bisa dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis. Walaupun demikian, setiap orang yang ingin masuk dalam persekutuan seharusnya menyatakan secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis untuk keamanan kepentingannya apabila terjadi perselisihan di antara partner. Suatu perjanjian

persekutuan yang sederhana menyatakan suatu peraturan-peraturan dari suatu usaha yang akan beroperasi. Perjanjian tertulis sangat bermacam-macam, tetapi hampir semua kontrak persekutuan memuat hal-hal berikut:

1. Nama dari persekutuan dan partnernya
2. Lokasi dan tipe usaha
3. Periode waktu yang tertulis dalam perjanjian
4. Jumlah dan jenis modal yang dikontribusikan oleh setiap partner
5. Metode pembagian laba rugi di antara partner
6. Gaji, jumlah pengambilan dan bunga yang diizinkan pada modal persekutuan.
7. Kekuatan dan keterbatasan dari partner dalam manajemen persekutuan.
8. Prosedur-prosedur pemasukan dan pemberhentian suatu partner dan pemberhentian usaha.

Kelebihan dari suatu perusahaan persekutuan komanditer yaitu:

- 1) Modal tersedia lebih banyak

Karena sumber-sumber modal berasal dari dua orang atau lebih yang dikombinasikan, maka otomatis jumlah modal akan tersedia lebih banyak. Modal tersebut kemudian digunakan untuk membangun suatu persekutuan dengan fondasi keuangan yang lebih kuat. Apabila suatu individu tidak mempunyai cukup uang untuk memulai suatu usaha, maka ia dapat mengundang seorang investor lain untuk join sebagai partner.

2) Meningkatkan kepercayaan kreditor

Lembaga keuangan atau investor dalam bentuk lainnya akan lebih berkenan untuk memperluas kreditnya pada saat partner membuat sendiri secara pribadi tanggung jawabnya terhadap hutang persekutuan. Karena dalam persekutuan lebih banyak pemilik, kreditor lebih percaya dalam memberikan pinjaman.

3) Keahlian dan ketrampilan bertambah

Adanya partner dengan berbagai latar belakang dapat saling melengkapi satu dengan lainnya dalam hal keterampilan, hubungan, dan keahlian. Masing-masing partner membawa kelebihan dan kekurangan pribadinya yang dapat dilengkapi dengan melakukan persekutuan.

4) Adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang

Dengan adanya variasi dalam manajemen dan banyaknya sumber modal akan dapat meningkatkan prospek dari persekutuan untuk tumbuh dan dapat memperluas produksi dan pemasarannya

Kekurangan-kekurangan persekutuan, terdiri dari:

a. Tanggung jawab yang tidak terbatas

Semua partner secara individu dan bersama mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang dan kewajiban persekutuan. Setiap partner bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau hilangnya partner lain yang bertindak atas nama usaha atau dengan kekuasaan partnernya

b. Umur yang terbatas

Secara hukum, suatu persekutuan dapat diberhentikan karena adanya kematian. Ketidakmampuan atau penarikan salah satu dari partner.

c. Lemahnya pengendalian

Setiap partner wajib bertanggung jawab terhadap keputusan dari partner yang lain. Penting sekali bagi semua partner untuk saling mengerti dan bisa bekerja sama secara baik antara satu dengan yang lain sebagaimana otoritas yang tersebar di antara partner. Tanpa kerja sama dan pengertian yang baik, perdebatan akan mudah terjadi.

2.3 Proposisi dan Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka proposisi yang dapat diambil pada penelitian ini adalah:

1. Penerapan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada CV. Karya Duta. Menginformasikan bahwa sistem akuntansi dapat memudahkan pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan berupa formulir, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan.
2. Peraturan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada CV. Karya Duta. Hal ini memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Sehingga, perusahaan memahami pencatatan yang benar dalam menyusun laporan

keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan tersebut. SAK-ETAP pada dasarnya sangat penting bagi perusahaan yang mengalami kesusahan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan secara umum. Keberadaan SAK ETAP seharusnya menjadi hal yang harus diketahui dan diterapkan dalam laporan keuangan para perusahaan berskala kecil dan menengah.

3. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK-ETAP terdiri dari; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini memberikan informasi bagi perusahaan tentang laporan keuangan yang lengkap menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jika, perusahaan telah melakukan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik maka dalam laporan keuangan tersebut akan meliputi;
 - a. Neraca, yang dibuat dengan cara mengutip saldo akun riil yaitu akun harta, akun hutang pada kertas kerja, sedangkan akun modal dikutip dari laporan perubahan modal.
 - b. Laporan laba – rugi, yang dibuat dengan cara mengurangkan pendapatan (penghasilan) dengan beban suatu entitas untuk suatu periode tertentu.

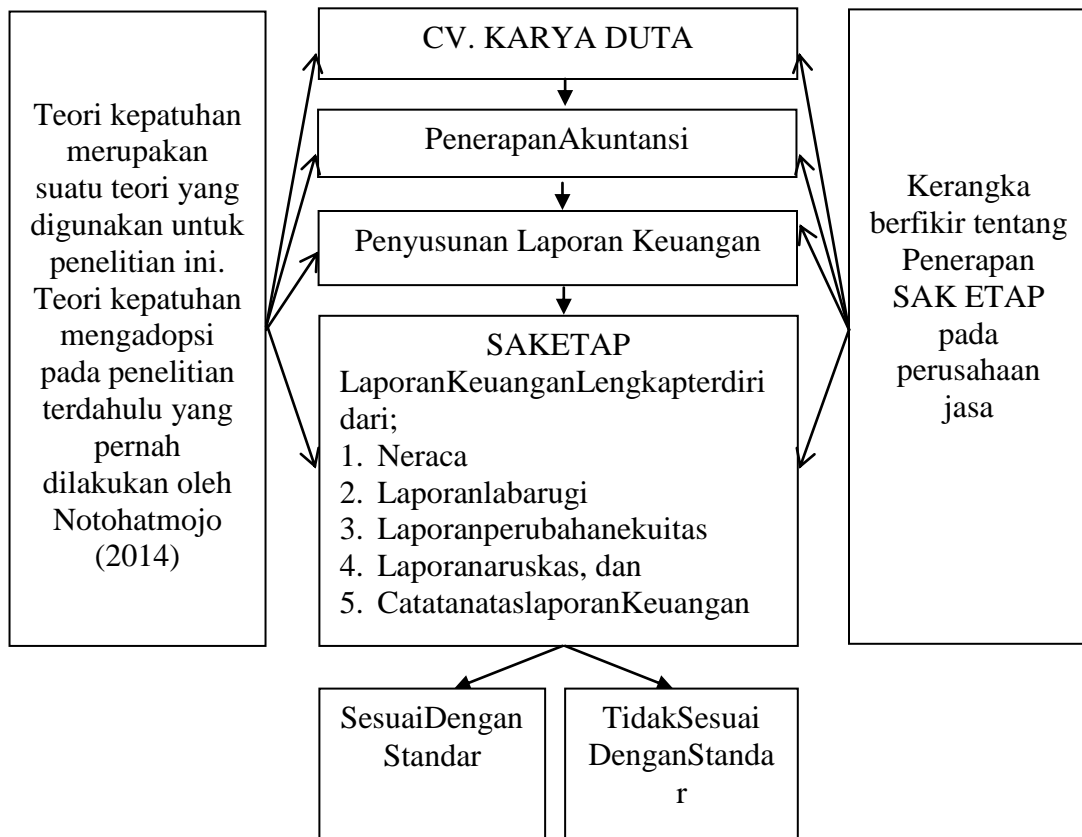
- c. Laporan perubahan ekuitas yang dibuat dengan cara pengurangan modal awal dengan prive. Lalu ditambahkan dengan laba periode berjalan.
 - d. Laporan arus kas, menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
 - e. Catatan atas laporan keuangan, berisi tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi criteria pengakuan dalam laporan keuangan.
4. Menganalisis laporan keuangan yang lengkap pada CV. Karya Duta apakah telah sesuai dengan standar atau tidak. Hal ini memberikan jawaban kepada peneliti yaitu jika perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik maka dalam penyusunan laporan keuangan tersebut telah menggunakan laporan keuangan yang lengkap. Namun, jika tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik maka tidak menggunakan laporan keuangan yang lengkap.

Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di CV. Karya Duta menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan meneliti sistem akuntansi, Setiap perusahaan baik perusahaan di bidang jasa, dagang maupun manufaktur pasti membutuhkan sistem akuntansi utama untuk memudahkan pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Setelah sistem tersebut diterapkan dan dievaluasi, diharapkan penyusunan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan pada CV. Karya Duta dapat dilakukan dengan baik dan tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik serta mengetahui alasan mengapa CV. Karya Duta tidak menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Dengan meneliti pencatatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik diharapkan peneliti dapat mengetahui bentuk pencatatan laporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh suatu Persekutuan Komanditer. Apakah penerapan tersebut telah sesuai atau tidak dengan SAK-ETAP.

Data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui observasi dan wawancara secara langsung. Sedangkan, sumber data penelitian secara tidak langsung diperoleh peneliti melalui perantara seperti data dokumentasi.

Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dihasilkan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, dilakukan analisis dan triangulasi data sehingga dapat disimpulkan hasil analisis dan triangulasi data.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual